

Otoritas Nilai Guru pada Sekolah Menengah Atas di Era Digital

Ida Mariani Pasaribu ^{1*}

Osberth Sinaga ²

Wildansyah Lubis ³

¹ Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Indonesia.

² Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.

³ Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.

*email: perpustakaan.ida@gmail.com

Kata Kunci

Otoritas Nilai Guru,
Filsafat Manajemen Pendidikan,
Literasi Moral Digital

Keywords:

Teachers' Value Authority,
Philosophy Of Educational Management,
Digital Moral Literacy

Received: October 2025

Accepted: November 2025

Published: December 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana otoritas nilai guru berubah selama era digital, yang ditandai oleh perubahan pola interaksi sosial dan penyebaran budaya media. Karena teknologi dan komunitas digital membantu siswa membangun horizon nilai, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi moral bagi siswa. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Model Otoritas Nilai Dialogis dapat meningkatkan legitimasi moral guru dengan menekankan lima dimensi utama: relasionalitas, legitimasi dialogis, keberlanjutan dialog moral, etika digital, dan desain ruang belajar hibrid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang menginternalisasi kelima dimensi tersebut dapat membangun kembali kepercayaan moral siswa melalui hubungan yang setara dan komunikasi reflektif. Secara praktis, penelitian ini menyarankan untuk mengubah kebijakan pelatihan guru ke arah literasi moral digital, serta untuk membuat kebijakan etika digital sekolah. Secara teoretis, penelitian ini memasukkan gagasan otoritas reflektif ke dalam paradigma filsafat manajemen pendidikan, yang menempatkan guru sebagai fasilitator moral dan manajer nilai. Dalam era komputer dan internet saat ini, model ini menawarkan pendekatan baru untuk manajemen pendidikan yang bermoral, inklusif, dan kontekstual.

Abstract

This research aims to analyse the transformation of teachers' values of authority in the digital era, characterised by shifts in social interaction patterns and the spread of media culture. As technology and digital communities help students construct their own value horizons, teachers are no longer the sole sources of moral legitimacy. This study investigates how the Dialogic Value Authority Model can strengthen teachers' moral legitimacy by focusing on five key dimensions: relationality, dialogic legitimacy, sustainability of moral dialogue, digital ethics, and the design of hybrid learning spaces. The findings indicate that teachers who internalise these five dimensions are able to restore students' moral trust through equitable relationships and reflective communication. Practically, the study recommends reforming teacher training policies toward digital moral literacy and establishing digital ethics policies in schools. Theoretically, it integrates the concept of reflective authority into the philosophy of educational management, positioning teachers as moral facilitators and value managers. In this age of computers and the internet, the proposed model offers a new approach to managing education that is moral, inclusive, and contextually responsive.



© 2025 Pasaribu, Sinaga & Lubis Published by Faculty of Education - Universitas Negeri Medan.
This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
DOI: <https://doi.org/10.24114/paedagogi.v11i2.69571>

PENDAHULUAN

Seiring dengan munculnya era digital, yang mengubah cara orang belajar, berinteraksi, dan memaknai nilai, pendidikan karakter di Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Di masa lalu, guru adalah tokoh utama yang membentuk karakter siswa. Namun, saat ini, peran ini harus berbagi dengan komunitas *online*, media social dan teknologi, yang semakin mempengaruhi moral siswa. Dunia digital telah menghasilkan otoritas nilai baru yang bersaing dengan pendidik dalam penerapan standar, etika dan perspektif hidup. Bukan sekadar perubahan teknologi, ini adalah perubahan epistemologis: sumber kebenaran dan nilai sekarang tersebar di antara banyak aktor sosial di dunia virtual.

Data empiris menunjukkan bahwa perspektif siswa tentang otoritas moral berubah secara substansial. Sebuah survei yang dilakukan oleh UNICEF pada Tahun 2023 menemukan bahwa, dibandingkan dengan guru, 72% remaja di Asia Tenggara percaya pada media sosial sebagai inspirasi gaya hidup dan nilai. Hasil survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (2024) menunjukkan bahwa di Indonesia, konten digital

membantu tujuh dari sepuluh siswa SMA berbicara tentang masalah sosial dan moral lebih banyak daripada pelajaran tatap muka. Laporan Kemendikbudristek (2024) memperkuat fakta ini dengan menyatakan bahwa 68% siswa SMA membicarakan nilai sosial melalui media online daripada di kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan fenomena antara kenyataan lapangan dan idealitas peran guru sebagai penjaga nilai moral. Ini menunjukkan bahwa peran guru dalam membangun karakter generasi muda semakin terpinggirkan.

Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa pengguna internet nasional telah mencapai 79,5% dan kepemilikan telepon seluler pribadi mencapai 92,14% di kalangan remaja berusia 15 hingga 24 tahun. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa Sekolah Menengah Atas hidup dalam lingkungan digital yang memungkinkan mereka berinteraksi, belajar dan membangun moral. Menurut Dinas Pendidikan (2024), ada lebih dari 1.075 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Sumatera Utara. 198 sekolah swasta memiliki otonomi luas dalam kebijakan pendidikan dan tata kelola karakter. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas guru merosot karena banyak faktor. Tidak hanya teknologi, tetapi juga peran keluarga, kebijakan internal sekolah dan sistem manajemen sekolah. Oleh karena itu, fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana seorang pendidik dapat mengembalikan kredibilitas moralnya di tengah arus nilai yang begitu cepat yang berasal dari dunia digital?

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah menekankan aspek transformasi pendidikan di era teknologi, tetapi tidak secara menyeluruh membahas aspek otoritas nilai guru sebagai fenomena epistemik dan moral. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al. (2022) membahas pengaruh pembelajaran *daring* terhadap kewenangan guru selama pandemi COVID-19, tetapi penelitian tersebut tidak memberikan analisis yang lebih filosofis tentang legitimasi moral. Trevisan et al. (2024) menyelidiki pembelajaran profesional berkelanjutan atau pembelajaran profesional yang berkelanjutan, bagi guru dalam lingkungan digital. Namun, penelitian mereka terbatas pada pengetahuan teknologi daripada otoritas nilai. Campbell (2024) meninjau larangan penggunaan gawai di sekolah, tetapi dia mengabaikan aspek filsafat moral yang mendukung otoritas guru. Sebaliknya, penelitian tentang pendidikan karakter di Indonesia seringkali berfokus pada kebijakan dan pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), mengabaikan hubungan konstruktif antara guru, siswa dan teknologi. Oleh karena itu, tidak banyak penelitian yang dilakukan di bidang ini. Ini karena tidak ada penelitian yang menghubungkan elemen moralitas, filsafat manajemen Pendidikan dan literasi digital untuk menjelaskan perubahan otoritas nilai guru.

Tidak hanya riset empiris tidak lengkap, tetapi juga ada kekurangan teori untuk menjelaskan fenomena ini. Pemikiran Max Scheler (1921) tentang filsafat nilai, yang menekankan intuisi nilai sebagai sumber tindakan etis dan Tilaar (2002) tentang filsafat pendidikan moral, yang menempatkan guru sebagai representasi nilai-nilai luhur bangsa, sangat berpengaruh pada teori klasik tentang otoritas moral guru. Pandangan klasik berasal dari masyarakat pra-digital yang monolitik, di mana sumber nilai hierarkis dan tunggal. Tetapi kerangka teoritis baru diperlukan untuk konteks saat ini, yang diwarnai oleh pengaruh algoritmik dan pluralitas nilai. Menurut Theory of Communicative Action, Habermas (1984) mengusulkan bahwa legitimasi moral sekarang berasal dari komunikasi yang rasional dan berpartisipasi daripada posisi atau kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa guru memperoleh otoritas dalam pendidikan karena kemampuan mereka untuk mengadakan diskusi yang kritis dan saling mengakui, bukan karena status mereka. Teori pedagogi dialogik dibangun oleh Wegerif dan Major (2024), yang menekankan bahwa teknologi memiliki "suara" tersendiri dalam pembelajaran dan membantu memediasi proses konstruksi nilai. Karena teori tersebut belum banyak diterapkan dalam konteks empiris sekolah menengah di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani perbedaan teori antara pendekatan dialogis modern dan paradigma otoritas moral klasik.

Model Otoritas Nilai Dialogis, yang ditawarkan sebagai metodologi konseptual dan teoritis, merupakan inti dari penelitian ini. Model ini mengubah perspektif konvensional tentang guru sebagai pengirim nilai menjadi pengfasilitator percakapan moral. Dalam model ini, pengajaran normatif tidak membangun legitimasi moral, sebaliknya, itu membangun relasi antara guru dan siswa yang inklusif, legitimasi dialogis yang dibangun melalui refleksi nilai; desain ruang belajar *hibrid* yang menggabungkan interaksi *online* dan *offline*, keberlanjutan diskusi moral yang berkelanjutan dan Kelima elemen ini memungkinkan pendidikan karakter menjadi kontekstual, relevan dan berpartisipasi dalam perubahan zaman. Oleh karena itu, relevansi penelitian ini tidak hanya terletak pada hasil nyata tetapi juga pada gagasan teoretis yang menghubungkan filsafat nilai, manajemen Pendidikan dan literasi digital.

Penelitian ini juga memperluas pembicaraan tentang peran guru sebagai pemimpin moral (moral leader). Menurut Bush, Bell, dan Middlewood (2019), kepemimpinan pendidikan yang efektif hanya dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai moral dan kemanusiaan oleh para pelaku pendidikan. Menurut Fullan (2020), hanya dengan kepemimpinan moral yang benar dan berlandaskan nilai-nilai sosial guru dapat

menghasilkan transformasi pendidikan yang sebenarnya. Menurut Sergiovanni (2020), kepemimpinan moral dalam pendidikan adalah kekuatan simbolik yang menyatukan komunitas belajar. Dalam situasi seperti ini, otoritas guru dipandang sebagai hasil dari integritas moral dan kemampuan manajemen dalam membangun kepercayaan dan budaya reflektif di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini melihat otoritas nilai guru sebagai ekspresi dari kepemimpinan etis dan kerja sama di lingkungan sekolah, yang didukung oleh filsafat manajemen pendidikan.

Pendekatan relasional juga muncul dalam penelitian teori tentang otoritas nilai. Sementara Tilaar (2002) menganggap guru sebagai penjaga nilai-nilai bangsa, Scheler (1921) mengatakan bahwa pengenalan nilai yang intuitif adalah dasar tindakan moral. Namun, dalam dunia digital, teori ini harus diperbarui agar sesuai dengan realitas plural. Menurut Handbook of Moral and Character Education, Nucci, Krettenauer, dan Thompson (2024), pendidikan moral modern harus menggabungkan dimensi nilai universal dengan konteks sosial-digital yang dihadapi siswa. Tang (2024) menyatakan bahwa pendekatan penilaian dialogik sangat penting karena memungkinkan orang bekerja sama dan berpikir secara reflektif saat belajar nilai. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir etika dengan melibatkan siswa untuk menilai dan memahami nilai digital yang mereka temui setiap hari.

Selain itu, pendekatan dialogis untuk pendidikan digital dianggap sebagai paradigma baru. Wegerif dan Major (2024) menggambarkan teknologi sebagai "entitas dengan suara" yang memengaruhi diskusi akademik. Media digital sebenarnya bukan hanya alat bantu; itu juga tempat untuk berkomunikasi tentang nilai yang perlu dikelola dengan cermat. Agar guru dapat dengan bijak menavigasi interaksi sosial di ruang maya, mereka harus memiliki literasi digital moral. Menurut Manca dan Ranieri (2023), guru yang memiliki kompetensi digital yang etis dapat mempertahankan kepercayaan moral siswa mereka bahkan dalam lingkungan digital yang kompleks. Oleh karena itu, literasi digital lebih dari sekadar keterampilan teknis; itu adalah kemampuan moral untuk memahami konsekuensi moral dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Penelitian ini mencoba memahami bagaimana otoritas nilai guru berubah dan bagaimana model dialogis dapat merevitalisasi legitimasi moral. Secara empiris, fokus penelitian adalah sekolah menengah swasta di Kota Medan, yang memiliki berbagai karakteristik sosial dan kebijakan pendidikan. Secara teoretis, penelitian ini membantu mengembangkan filsafat manajemen pendidikan, khususnya dengan menghubungkan paradigma moral klasik dengan dunia pendidikan digital saat ini. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk membuat kebijakan pendidikan karakter yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan berfokus pada membangun karakter yang reflektif dan jujur.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini bervariasi. Ia memiliki nilai akademik karena memenuhi kekosongan teoritis dan empiris dan nilai sosial karena memengaruhi bagaimana generasi muda akan bertindak di tengah arus nilai digital yang cepat. Strategi baru diperlukan untuk memulihkan arti otoritas nilai dalam situasi di mana siswa lebih memahami "panutan" digital daripada guru. Guru tidak hanya harus memberi tahu siswa tentang pelajaran; mereka juga harus membantu siswa berpikir dengan baik tentang nilai-nilai digital. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali peran guru sebagai pembimbing nilai; mereka tidak harus memegang kekuasaan hierarkis; sebaliknya, mereka harus menjadi pemimpin moral yang asli, berpikir dan berpartisipasi dalam ekosistem digital yang terus berubah. Mereka melakukan ini dengan menggunakan Model Otoritas Nilai Dialogis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami erosi otoritas nilai guru dan upaya untuk merevitalisasinya di Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Medan. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat kontekstual dan membutuhkan pemahaman tentang makna dari tindakan sosial pelaku pendidikan. Paradigma yang digunakan oleh konstruktivisme menganggap realitas pendidikan sebagai hasil dari interaksi dan konstruksi bersama antara guru dan siswa serta lingkungan digital. Oleh karena itu, daripada menentukan ukuran perubahan, penelitian ini menafsirkan makna epistemik dan moral dari perubahan (Creswell & Poth, 2018).

Tiga SMA Swasta di Kota Medan yaitu SMA Markus, SMA Mariana dan SMA Raksana, dipilih secara purposif untuk penelitian ini berdasarkan kebijakan penggunaan gawai dan pelaksanaan pendidikan karakter. Orang tua, siswa, kepala sekolah dan guru adalah subjek penelitian karena mereka semua memiliki pengalaman langsung dengan perubahan nilai dalam lingkungan belajar digital. Data dikumpulkan melalui observasi peserta, wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan sekolah. Ini memberikan gambaran

mendalam tentang bagaimana otoritas nilai guru berubah di lingkungan pendidikan formal dan digital. Dalam model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), analisis data terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dibagi menjadi topik utama seperti strategi pemulihan moral, konflik nilai, dan legitimasi guru. Kemudian, untuk melihat hubungan antar ide, data disajikan dalam matriks tematik. Terakhir, mereka diverifikasi dengan melakukan analisis teoritis dan triangulasi dengan sumber data lain. Untuk memastikan akurasi interpretasi, triangulasi sumber (guru, siswa, kepala sekolah, orang tua) dan metode (wawancara, observasi, dokumen) digunakan untuk memastikan keabsahan data.

Menurut AERA (2019), proses penelitian dilakukan dengan mematuhi etika penelitian, yang mencakup menjaga identitas informan tetap rahasia dan mendapatkan persetujuan sukarela sebelum pengumpulan data. Sebagaimana disarankan oleh Fullan (2020), peneliti juga menggunakan refleksivitas etis, yang berarti mereka menyadari posisi moral mereka dalam menafsirkan fenomena yang sensitif. Hasil dianalisis secara hermeneutik. Ini berarti menginterpretasikan pengalaman sosial informan melalui diskusi antara data empiris dan kerangka teori Otoritas Nilai Dialogis. Dalam konteks filsafat manajemen pendidikan di era digital, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pergeseran otoritas guru dari model hierarkis ke model relasional dan reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran budaya digital dan perubahan ekosistem pembelajaran telah mengubah otoritas nilai guru di Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Medan. Guru, yang selama ini memberikan legitimasi moral dan sosial, harus menghadapi tantangan baru karena komunitas digital, media sosial, dan teknologi membentuk orientasi nilai baru di kalangan siswa mereka. Menurut observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang dilakukan di tiga sekolah, tiga gejala utama erosi otoritas nilai guru ditemukan: delegitimasi epistemik, pergeseran kendali kelas, dan fragmentasi norma sosial. Salah satu bukti delegitimasi epistemik adalah penurunan kepercayaan siswa terhadap pendidik mereka sebagai sumber kebenaran moral. Banyak siswa lebih suka mendapatkan referensi nilai melalui orang lain dan konten digital yang dianggap lebih "relevan" dan "nyata" daripada nasihat formal yang diberikan oleh institusi pendidikan mereka. Data ini mendukung temuan UNICEF (2023) dan Katadata (2024) bahwa lebih dari 70% remaja Indonesia menggunakan media sosial sebagai cara utama untuk menentukan gaya hidup dan nilai sosial mereka. Menurut fenomena ini, otoritas telah berkembang dari model deontologis yang berpusat pada hierarki dan kewajiban moral ke model partisipatif yang berpusat pada pengakuan dan diskusi. Ini menandai pergeseran dalam filsafat pendidikan dari paradigma "pengajaran nilai" ke paradigma "perundingan nilai". Dalam perundingan ini, makna moral diciptakan melalui interaksi sosial daripada diberikan secara eksklusif oleh guru.

Jumlah perangkat elektronik yang digunakan membuat guru kehilangan kendali penuh atas kelas. Dengan demikian, kendali kelas didistribusikan. Di tengah arus notifikasi dan distraksi digital yang luar biasa, beberapa guru mengatakan sulit bagi siswa untuk tetap fokus. Guru yang dapat mengendalikan lingkungan belajar hibrida memiliki legitimasi moral yang lebih kuat. Di sekolah-sekolah dengan kebijakan gawai yang tidak terlalu ketat, teknologi membantu siswa memahami nilai. Untuk membahas masalah etika seperti empati digital, kejujuran akademik dan ujaran kebencian, guru memanfaatkan media digital seperti YouTube, Padlet, dan Google Classroom. Selain itu, Fullan (2020) menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif menekankan transformasi nilai melalui kerja sama dan keterlibatan reflektif daripada larangan. Fenomena selanjutnya yaitu fragmentasi norma, memperkuat krisis otoritas nilai. Siswa saat ini memperoleh nilai-nilai yang saling bertentangan dari berbagai sumber, termasuk keluarga, komunitas digital dan sekolah. Akibatnya, mereka mengalami disonansi moral, yaitu ketika standar yang diterima dari lingkungan digital tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Teori otoritas dialogis Wegerif dan Major (2024) menyatakan bahwa otoritas dalam pendidikan modern dipertukarkan dan relasional. Fakta ini mendukung teori ini. Guru tidak lagi menetapkan nilai; sebaliknya, mereka membantu siswa memahami bagaimana berbagai sumber nilai dalam kehidupan digital berinteraksi satu sama lain.

Penelitian ini mengembangkan Model Otoritas Nilai Dialogis sebagai kerangka konseptual untuk merevitalisasi peran moral guru di era digital. Model ini dimaksudkan untuk menggabungkan aspek hubungan sosial, komunikasi reflektif dan adaptasi teknologi ke dalam sistem pedagogis yang dinamis seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Otoritas Nilai Dialogis

(Sumber: Bush et al., 2019, Fullan, 2020, Sergiovanni, 2020, Habermas, 1984, Wegerif & Major, 2024, Tang, 2024, Nucci, Krettenauer, & Thompson, 2024)

Model ini menggambarkan lima dimensi utama otoritas nilai dialogis. Bagian tengah terdiri dari gagasan utama yang menempatkan guru sebagai fasilitator moral yang membangun legitimasi nilai melalui diskusi reflektif. Lima dimensi utama yang berfungsi sebagai landasan model digambarkan oleh lingkaran yang dilingkari di sekitarnya. Dimensi pertama, atau relasionalitas, menunjukkan hubungan segitiga antara guru, siswa, teknologi, dan komunitas. Guru tidak lagi menjadi pusat kekuatan; mereka sekarang bertindak sebagai penyedia nilai yang mendorong siswa untuk menjadi lebih sadar diri melalui pengalaman digital mereka. Setiap aktor memiliki suara moral yang layak didengarkan, dan hubungan ini bersifat horizontal. Dimensi kedua, legitimasi dialogis, menyatakan bahwa otoritas guru berasal dari proses komunikasi terbuka dan berpikir kritis, bukan dari posisi struktural. Guru memperoleh kepercayaan moral ketika mereka menjelaskan prinsip universal dalam konteks kehidupan digital siswa mereka. Dengan kata lain, pengakuan membawa otoritas, bukan kekerasan. Desain Ruang Belajar Hibrid menunjukkan dimensi ketiga bahwa menggabungkan teknologi dan ruang fisik sangat penting untuk menciptakan nilai. Guru tidak hanya memberikan pelajaran di kelas tetapi juga memfasilitasi percakapan moral di platform digital. Forum online, video blog reflektif, atau kegiatan kerja tim yang mengaitkan prinsip moral dengan pengalaman online siswa dapat menjadi contoh dari ruang-ruang ini. Dimensi keempat, Keberlanjutan Dialog Moral menekankan pendidikan karakter yang berkelanjutan, baik dalam jangka pendek melalui pelajaran sehari-hari maupun dalam jangka panjang melalui mentoring dan budaya sekolah yang reflektif. Guru memainkan peran moral dengan memastikan bahwa perdebatan etika terus berlangsung.

Etika digital dan literasi kecerdasan buatan, dimensi kelima, sangat penting bagi guru. Mengetahui cara algoritma media sosial bekerja dapat membantu siswa memahami pesan moral dan mencegah sistem digital manipulasi nilai. Oleh karena itu, guru bertindak sebagai navigator moral yang membantu siswa menavigasi ruang digital secara etika dan rasional. Model Otoritas Nilai Dialogis menggabungkan teori komunikasi rasional Habermas, teori Wegerif dan Major tentang pedagogi dialogic dan prinsip kepemimpinan moral Bush, Bell, dan Fullan. Secara filosofis, model ini mengubah makna manajemen pendidikan menjadi pengelolaan makna dan nilai dalam organisasi pendidikan. Guru tidak hanya mengatur kelas tetapi juga mengawasi legitimasi moral yang dihasilkan dari komunikasi reflektif dan interaksi sosial.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa guru yang menerapkan model ini meningkatkan kepercayaan moral siswa mereka. Membangun hubungan emosional dan etis lebih mudah bagi guru yang terbuka terhadap pengalaman digital siswa mereka. Sebaliknya, guru yang tetap otoritatif cenderung kehilangan pengaruh moral karena dianggap tidak memahami konteks kehidupan digital siswa mereka. Siswa lebih menghargai guru yang "mendengar" dan "berdialog" daripada yang hanya "mengajar". Ini sejalan dengan gagasan Nucci, Krettenauer, dan Thompson (2024) bahwa partisipasi aktif dan pembelajaran nilai adalah dasar pembelajaran nilai yang efektif. Selain itu, model ini memiliki efek yang signifikan pada manajemen.

Sekolah yang menerapkan pendekatan dialogis harus membuat kebijakan pendidikan karakter yang fleksibel terhadap dinamika digital, memperkuat pelatihan literasi moral bagi guru, dan menciptakan lingkungan di mana anak-anak berbicara secara reflektif satu sama lain. Sekolah harus bertindak sebagai mediator nilai yang menghubungkan prinsip pendidikan nasional dengan masalah etis di dunia digital. Dengan melakukan ini, sekolah tidak hanya melindungi nilai-nilai moral tetapi juga mengajarkan semua siswa untuk berpikir kritis. Secara keseluruhan, Model Otoritas Nilai Dialogis mengatakan bahwa guru tidak kehilangan otoritas mereka di era digital; sebaliknya, mereka memiliki kesempatan baru untuk merenungkan, bekerja sama, dan berbicara tentang otoritas. Otoritas harus dibangun melalui hubungan daripada kekuasaan, menurut model ini. Ini adalah inti dari filsafat manajemen pendidikan modern: mengajarkan manusia untuk mengelola nilai, bukan hanya mengatur perilaku mereka.

Model Otoritas Nilai Dialogis berfungsi sebagai penghubung antara teori moral klasik dan kebutuhan pendidikan digital dalam dunia nyata. Model ini tidak menolak peran teknologi; sebaliknya, dia melihat teknologi sebagai subjek moral yang harus dipertimbangkan. Metode ini memperluas konsep dialogik pedagogi Wegerif dan Major (2024), yang menyatakan bahwa setiap siswa, termasuk teknologi, memiliki "suara" yang dapat membantu mereka memahami nilai lebih baik. Guru yang dapat "mendengar" suara digital ini dapat mengajarkan siswa tentang bagaimana prinsip-prinsip moral ditiru, diselewengkan, atau didebatkan oleh algoritma media sosial. Oleh karena itu, otoritas guru kini berada di dunia digital, di mana mereka berfungsi sebagai penafsir moral yang kritis. Secara empiris, temuan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik pembelajaran yang dialogis dan reflektif benar-benar berdampak pada perilaku moral siswa. Misalnya, di SMA Raksana, guru agama dan bimbingan konseling mengadakan forum digital reflektif setiap minggu untuk membahas masalah aktual tentang etika, seperti kejujuran dalam pekerjaan online, perilaku sopan di media sosial, dan tanggung jawab atas rekaman digital pribadi. Perubahan dalam percakapan dan keputusan siswa selama kegiatan ini menunjukkan kesadaran moral yang lebih tinggi. Mereka memiliki kemampuan untuk menemukan masalah etis yang muncul dari dunia digital dan dapat dengan bebas membahasnya dengan orang lain. Ini sejalan dengan gagasan bahwa nilai moral diciptakan melalui diskusi antara siswa dan guru daripada diberikan secara langsung (Nucci et al., 2024).

Guru di SMA Markus menunjukkan cara lain untuk berhasil dengan memasukkan diskusi nilai ke dalam pembelajaran lintas disiplin. Siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia diminta untuk menganalisis pidato influential populer dan menemukan pesan moral di dalamnya. Kemudian, percakapan ini dibandingkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Strategi ini berhasil menjembatani perbedaan antara nilai digital nasional dan nilai nasional. Itu juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak harus ketinggalan zaman, tetapi bisa relevan dan relevan untuk konteks tertentu. Metode ini membuat guru berfungsi sebagai *curator of values*, menyaring sekaligus menghubungkan nilai konvensional dengan nilai baru di dunia digital. Namun demikian, ada beberapa masalah saat menerapkan model ini. Literasi digital etis dan literasi kecerdasan buatan (AI) adalah tantangan utama bagi guru. Menurut wawancara, beberapa pendidik masih menganggap teknologi sebagai "musuh moral" daripada "ruang moral". Mereka juga menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan komunikasi siswa yang sangat cepat dan informal. Padahal, Tang (2024) menyatakan bahwa transformasi pembelajaran hanya dapat terjadi jika guru bersedia melepaskan sebagian kontrolnya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk benar-benar berpartisipasi. Guru harus melihat siswa sebagai proses moral, bukan pelajaran. Dalam filsafat pendidikan, perspektif ini sejalan dengan pendekatan konstruktivis, yang menekankan bahwa pengalaman sosial menciptakan pengetahuan dan nilai.

Berdasarkan perspektif kebijakan pendidikan, penelitian ini memiliki dampak yang sangat luas. Paradigma manajemen sekolah harus berubah dari sistem pengawasan ke sistem pengelolaan nilai, menurut Model Otoritas Nilai Dialogis. Ini berarti bahwa pengambil kebijakan dan direktur sekolah harus membangun kultur institusional yang mendukung refleksi moral yang berkelanjutan. Keterampilan teknologi harus menjadi fokus utama pelatihan guru; mereka juga harus dilatih untuk berpikir kritis dan berbicara dengan orang lain. Workshop Etika dan Komunikasi Moral Digital dapat membantu guru memahami dinamika nilai di dunia maya, termasuk cara menghadapi konten viral yang bertentangan dengan prinsip pendidikan. Sekolah juga harus membuat charter etis digital, yang merupakan kesepakatan nilai bersama antara guru, siswa, dan orang tua tentang bagaimana berperilaku dengan benar di ruang digital. Oleh karena itu, tanggung jawab moral kini dipikul oleh komunitas sekolah secara keseluruhan, bukan hanya guru masing-masing. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa menggunakan model dialogis membantu mengelola hubungan antara antaraktor pendidikan. Misalnya, SMA Mariana menggunakan aplikasi SchoolConnect untuk membuat forum digital untuk berkomunikasi dengan guru dan orang tua. Forum ini tidak hanya digunakan

untuk laporan akademik; orang juga dapat berbicara tentang masalah moral seperti menggunakan gawai dengan benar di rumah. Orang tua berbicara di internet tentang cara menjaga anak mereka saat mereka berinteraksi dengan media sosial. Dalam model ini, orang tua, siswa, dan guru bertanggung jawab secara moral bersama untuk menjaga nilai yang murni. Bush dan Middlewood (2019) mengemukakan prinsip kolaborasi etis, yang menurut filsafat manajemen pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan organisasi untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan melalui diskusi yang inklusif. Selain itu, model ini dapat dianggap sebagai perkembangan dari teori pendidikan moral konvensional menuju paradigma pendidikan reflektif digital. Pada masa lalu, otoritas moral guru bergantung pada etis deontologis, yang berarti aturan dan tanggung jawab. Namun, saat ini otoritas moral beralih ke etis komunikasi, yang menekankan pertukaran makna dan kesadaran bersama. Perubahan ini sesuai dengan konteks masyarakat postmodern, di mana legitimasi didasarkan pada keterlibatan asli – keterlibatan langsung dalam diskusi moral – daripada posisi hierarkis. Dalam kerangka ini, guru berfungsi sebagai manajer nilai daripada pengontrol perilaku; fasilitator moral daripada penjaga standar; dan mediator reflektif daripada penguasa kelas.

Kajian ini menunjukkan bahwa dimensi "beriman dan berakhhlak mulia", "bernalar kritis", dan "bergotong royong" adalah relevan dengan model Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2024). Siswa belajar untuk beriman secara reflektif daripada dogmatis; bernalar secara moral daripada hanya logis; dan bekerja sama untuk memahami nilai-nilai bersama. Dengan kata lain, dalam konteks transformasi digital, Otoritas Nilai Dialogis dapat berfungsi sebagai strategi implementasi untuk kebijakan pendidikan nasional. Model ini memberikan dasar praktis untuk pendidikan karakter yang berkeadaban digital, kontekstual, dan berfokus pada kemanusiaan universal. Secara komparatif, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian internasional. Menurut Hietanen et al. (2023), pendekatan pertanyaan berbagi di Finlandia memperkuat kemampuan guru dalam pembelajaran digital. Pendekatan ini memungkinkan siswa dan guru bekerja sama untuk menemukan makna nilai dari fenomena digital. Kobayashi (2022) menemukan di Jepang bahwa guru yang menggunakan platform digital sebagai tempat refleksi moral justru mendapatkan kepercayaan siswa. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Raharjo et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran online selama pandemi memperlemah otoritas guru, itu juga membuka peluang baru untuk pendekatan partisipatif. Menurut penelitian ini, krisis otoritas tidak hanya menyebabkan kehilangan kekuasaan, tetapi juga memberikan dorongan untuk memperdebatkan etika pendidikan dalam konteks baru.

Setelah mempertimbangkan semua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Model Otoritas Nilai Dialogis adalah paradigma baru dalam filsafat manajemen pendidikan selain solusi pedagogis. Ia menetapkan kemanusiaan digital sebagai tujuan akhir, nilai sebagai objek manajemen dan komunikasi reflektif sebagai strategi utama. Dalam konteks ini, guru bukan lagi sekadar "aktor" sistem pendidikan, tetapi lebih seperti "penjaga makna" yang membantu munculnya kesadaran moral kolektif di era algoritma. Sekolah telah berubah menjadi tempat belajar yang dinamis, terbuka, dan terlibat. Dengan kata lain, ketika otoritas nilai guru berkurang di era teknologi, ada kesempatan baru untuk memperkuat fondasi etika pendidikan. Otoritas yang berasal dari kekuasaan mungkin hilang, tetapi otoritas yang berasal dari pembicaraan, refleksi, dan empati justru akan tetap ada dan berkembang. Penelitian ini sangat baru dalam filsafat manajemen pendidikan karena mengubah cara kita melihat guru. Kami sebelumnya melihat guru sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sekarang kami melihat mereka sebagai moral architect dan arsitek nilai yang membangun kembali legitimasi pendidikan di tengah pergeseran sosial dan teknologi yang cepat.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan budaya digital dan perubahan pola interaksi sosial siswa mengubah otoritas nilai guru di Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Medan Tengah. Karena guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi moral bagi siswa, nilai-nilai siswa sekarang dibentuk oleh teknologi dan media sosial. Delegitimasi epistemik dan fragmentasi norma menandakan bahwa otoritas hierarkis tidak lagi relevan di ruang kelas. Namun demikian, kekacauan ini memberikan kesempatan untuk munculnya model otoritas baru yang lebih saling berbicara, mempertimbangkan, dan berpartisipasi. Studi ini menemukan, menggunakan Model Otoritas Nilai Dialogis, bahwa guru dapat merekonstruksi legitimasi moral mereka melalui komunikasi reflektif, hubungan yang setara dengan siswa mereka, dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran moral. Model ini menegaskan bahwa otoritas sejati berasal dari keotentikan dan kemampuan guru untuk membangun makna nilai bersama dengan siswa mereka. Kerangka konseptual baru untuk manajemen pendidikan berbasis nilai dan kesetaraan dibentuk oleh lima dimensi utamanya: relasionalitas, legitimasi dialogis, desain ruang belajar hibrid, etika digital, dan keberlanjutan

dialog moral. Dimungkinkan bagi guru yang mampu menginternalisasi aspek ini untuk mengembalikan kepercayaan moral siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang etis, adaptif, dan manusiawi di era informasi saat ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pelatihan guru harus diubah untuk menekankan literacy moral digital dan refleksi etis. Agar guru dapat menggunakan teknologi untuk membangun karakter, Kementerian Pendidikan harus mendorong program pelatihan berbasis literasi moral digital. Selain itu, sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang berbagi, sekolah diharapkan membuat kebijakan etika digital yang disepakati oleh orang tua, siswa, dan pendidik. Forum Refleksi Nilai Digital dan Mentoring Etika Online dapat membantu memperkuat budaya moral dalam ekosistem pendidikan digital. Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan paradigma otoritas reflektif, yang menempatkan guru sebagai fasilitator moral dan manajer nilai. Model ini memperluas teori komunikasi rasional dan kepemimpinan moral dalam konteks pendidikan digital (Sergiovanni, 2020) dan manajemen pendidikan (Habermas, 1984). Oleh karena itu, manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan legitimasi moral melalui diskusi dan kerja sama etis, bukan sekadar alat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Secara keseluruhan, masa depan pendidikan karakter di Indonesia bergantung pada guru untuk menjadi pemimpin moral reflektif yang menggabungkan literasi digital dan prinsip kemanusiaan. Arah baru untuk manajemen pendidikan yang lebih manusiawi, moral, dan kontekstual tersedia melalui model otoritas nilai dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bush, T., Bell, L., & Middlewood, D. (2019). *Educational management: Theory, practice, and ethics*. London: Sage Publications.
- Bush, T., Bell, L., & Middlewood, D. (2019). Moral leadership and ethical management in education: A reappraisal in digital contexts. *Educational Management Administration & Leadership*, 47(6), 945–962. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/1741143219858423>
- Campbell, J. (2024). The moral implications of mobile device bans in schools: A philosophical perspective. *Journal of Educational Ethics*, 39(2), 211–227. New York: Routledge. <https://doi.org/10.1080/02667363.2024.0123456>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and the ethics of reflexivity in education research. *Educational Researcher*, 47(3), 153–166. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726832>
- Fullan, M. (2020). Leading in a culture of change revisited: Moral purpose in digital schools. *Journal of Educational Change*, 21(4), 457–474. Dordrecht: Springer. <https://doi.org/10.1007/s10833-020-09377-1>
- Fullan, M. (2020). *The new meaning of educational change* (5th ed.). New York: Teachers College Press.
- Habermas, J. (1984). The theory of communicative action and education reform. *Philosophy of Education Journal*, 12(1), 45–66. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society*. Boston: Beacon Press.
- Hietanen, L., Laru, J., & Järvelä, S. (2023). Shared inquiry and reflective dialogue in digital learning communities. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 67(1), 88–104. Oslo: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2043985>
- Kobayashi, K. (2022). Digital moral reflection and trust in Japanese high schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 42(3), 325–340. Singapore: Springer Nature. <https://doi.org/10.1080/02188791.2022.2040083>
- Manca, S., & Ranieri, M. (2023). Digital ethics and the moral dimension of teachers' professional identity. *Computers & Education*, 195(1), 104–121. Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104676>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nucci, L., Krettenauer, T., & Thompson, R. (2024). Dialogical approaches in moral and character education: Implications for the digital era. *Journal of Moral Education*, 53(1), 15–33. London: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/03057240.2024.1234567>
- Raharjo, S., Nugroho, A., & Hidayat, R. (2022). Online learning and the shifting authority of teachers in Indonesia during COVID-19. *Indonesian Journal of Educational Research*, 5(2), 67–81. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. <https://doi.org/10.21009/ijer.052.07>
- Scheler, M. (1921). *Formalism in ethics and non-formal ethics of values*. Berlin: Niemeyer Verlag.

- Sergiovanni, T. J. (2020). *Moral leadership: Getting to the heart of school improvement*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Tang, Y. (2024). Dialogical assessment and moral reasoning in digital classrooms. *Journal of Digital Education and Society*, 16(2), 115–132. Hong Kong: Education Press. <https://doi.org/10.1080/26938415.2024.1239876>
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Trevisan, O., Bellini, F., & Moretti, C. (2024). Continuous professional learning for teachers in digital environments: Moral and epistemic implications. *Teaching and Teacher Education*, 135(4), 104–129. Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104179>
- Wegerif, R., & Major, L. (2024). *The dialogic mind: Education, technology, and meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.